

SKRIPSI

**STRATEGI PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
PADA PENGEMBANGAN PARIWISATA
(STUDI KASUS DESA SAMPULUNGAN, KABUPATEN
TAKALAR)**

Disusun dan diajukan oleh

**ANANDA DWI PRATIWI
D101 18 1330**



**PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH
DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

STRATEGI PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PENGEMBANGAN PARIWISATA Studi Kasus Desa Sampulungan, Kabupaten Takalar

Disusun dan diajukan oleh

ANANDA DWI PRATIWI
D101181330

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Ir. Mukti Ali, ST., MT., Ph.D., IPU

NIP. 19741211 200501 1 001

Pembimbing Pendamping,



Sri Aliah Ekawati, ST., MT.

NIP. 19850824 201212 2 004

Ketua Program Studi, Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin



Dr. Eng. Abdul Rachman Rasyid, ST., M.Si

NIP. 19741006 200812 1 002



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat serta Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat pada Pengembangan Pariwisata”, sebagai salah satu syarat kelulusan pada Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangat dibutuhkan. Namun, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, terkhusus bagi pemerintah Desa Sampulungan. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi serta memudahkan jalan kita.

Gowa, 20 Agustus 2024

Ananda Dwi Pratiwi

Sitasi dan Alamat Kontak:

Harap menuliskan sumber skripsi ini dengan cara penulisan sebagai berikut.

Pratiwi, A. P. (2024). *Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat pada Pengembangan Pariwisata*, Skripsi Sarjana, Prodi S1 PWK Universitas Hasanuddin. Makassar.



ingkatan kualitas dari skripsi ini, kritik dan saran dapat dikirimkan ke
relalui alamat email berikut ini: anandadwipratiwi01@gmail.com

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ananda Dwi Pratiwi
NIM : D101181330
Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK)
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

**Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat pada Pengembangan Pariwisata
(Studi Kasus: Desa Sampulungan, Kabupaten Takalar)**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain dan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Semua informasi yang ditulis dalam skripsi yang berasal dari penulis lain telah diberi penghargaan, yakni dengan mengutip sumber dan tahun penerbitannya. Oleh karena itu semua tulisan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Apabila ada pihak manapun yang merasa ada kesamaan judul dan atau hasil temuan dalam skripsi ini, maka penulis siap untuk diklarifikasi dan mempertanggungjawabkan segala resiko.

Segala data dan informasi yang diperoleh selama proses pembuatan skripsi, yang akan dipublikasi oleh penulis di masa depan harus mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Gowa, 20 Agustus 2024

Yang Menyatakan,



Ananda Dwi Pratiwi



UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala keberkahan dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga nantinya ilmu yang diperoleh oleh peneliti dapat membawa manfaat, baik bagi peneliti maupun orang lain. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, namun tentunya hasil dari doa dan semangat dari berbagai pihak, skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah menuntun penulis, memberikan kemudahan, kemampuan, kekuatan, dan atas izin-Nya skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Kedua orang tua tersayang (Bapak Syamsu Alam dan Ibu Arni) dan saudara terbaik (Muh. Arsyam Alam Pratama dan Adinda Putri Syakinah) yang selalu mendoakan, memberikan dukungan, bantuan, dan motivasi yang tiada henti-hentinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Rektor Universitas Hasanuddin (Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.) atas dukungan dan bantuannya.
4. Dekan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin (Bapak Prof. Dr. Eng. Ir. Muhammad Isran Ramli, ST., MT.) atas segala kebijakannya.
5. Kepala Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Hasanuddin (Bapak Dr. Eng. Abdul Rachman Rasyid, ST., M.Si. IPM) dan Sekretaris Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Hasanuddin (Ibu Sri Aliah Ekawati, ST., MT.) atas bimbingan akademik dan administrasi selama penulis menempuh pendidikan.
6. Dosen Pembimbing Akademik (Bapak Dr. Eng. Abdul Rachman Rasyid, ST., M.Si. IPM) atas segala bimbingan dan nasihat yang telah diberikan.
7. Kepala LBE *Waterfront City Planning and Development* Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin (Bapak Ir. Mukti Ali, ST., MT., Ph.D., IPU) atas waktu, bimbingan dan nasihat telah diberikan.



dan Pembimbing Utama (Bapak Ir. Mukti Ali, ST., MT., Ph.D., IPU) yang meluangkan waktunya dalam membantu, membimbing, memberikan

arahan, pengetahuan baru, motivasi, serta dukungan kepada penulis hingga akhir penyusunan skripsi.

9. Dosen Pembimbing Pendamping (Ibu Sri Aliah Ekawati, ST., MT.) yang meluangkan waktunya dalam membantu, membimbing, memberikan arahan, pengetahuan baru, motivasi, serta dukungan kepada penulis hingga akhir penyusunan skripsi.
10. Kepala Studio Akhir (Ibu Dr. Techn. Yashinta K. D. Sutopo, ST., MIP.) atas bimbingan dan nasihat yang telah diberikan.
11. Dosen Penguji (Bapak Prof. Dr. Ir. Arifuddin Akil, MT. dan Ibu Sri Wahyuni, ST., MT.) atas kritik, saran, serta arahan yang diberikan kepada penulis.
12. Seluruh dosen Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
13. Seluruh Staf Administrasi dan Pelayanan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin (Bapak Haerul Muayyar, S.Sos, Bapak Faharuddin, Bapak Sawalli B. dan Ibu Tini) atas kesabaran, kebaikan, dan bantuannya kepada penulis selama menempuh pendidikan.
14. Teman-teman LBE *Waterfront City Planning and Development* dan Angkatan 2018 yang telah kebersamai selama masa perkuliahan.

Gowa, 2024

Ananda Dwi Pratiwi



ABSTRAK

ANANDA DWI PRATIWI. *Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat pada Pengembangan Pariwisata. Studi Kasus Desa Sampulungan, Takalar* (dibimbing oleh Mukti Ali dan Sri Aliah Ekawati)

Perkembangan pariwisata yang terjadi di Desa Sampulungan seharusnya tak terlepas dari dukungan serta partisipasi masyarakat desa. Namun, berdasarkan observasi awal yaitu wawancara dengan pegawai kantor desa mengatakan bahwa belum ada bentuk partisipasi lain dari masyarakat selain menjadi pelayan di objek wisata yang ada. Sehingga dapat dikatakan tingkat partisipasi masyarakat pada pengembangan pariwisata di Desa Sampulungan masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi desa dan mengidentifikasi tingkat partisipasi masyarakat kemudian merumuskan strategi peningkatannya. Penelitian dilakukan di Desa Sampulungan, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar pada bulan September 2021 hingga November 2022. Pengumpulan data dilakukan dengan survei, kuesioner, wawancara, dan juga dokumentasi. Serta menggunakan beberapa metode diantaranya analisis deskriptif, analisis korelasi, skala guttman, pemetaan, analisis SWOT, dan AHP. Hasil penelitian menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat, berdasarkan teori Arnstein terdapat pada tangga terapi yang termasuk ke dalam klasifikasi *non participation*. Maka dari itu, dibuat strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang disusun berdasarkan faktor-faktor yang berpengaruh. Adapun arahan strategi diantaranya memanfaatkan potensi budaya sebagai daya tarik wisatawan, membuat Kelompok Sadar Wisata, melakukan pelatihan manajemen pariwisata ekonomi kreatif, melakukan pemeliharaan akses jalan dan perbaikan terhadap jalan yang mengalami kerusakan, serta menambahkan rambu-rambu petunjuk arah yang jelas ke lokasi wisata. Berdasarkan beberapa strategi tersebut yang menjadi strategi prioritas yaitu membuat Kelompok Sadar Wisata (pokdarwis) bagi masyarakat desa.

Kata Kunci: Arnstein, partisipasi masyarakat, pengembangan pariwisata, SWOT.



ABSTRACT

ANANDA DWI PRATIWI. *Strategy for Increasing Community Participation in Tourism Development Case Study Sampulungan Village, Takalar District (guided by Mukti Ali and Sri Aliah Ekawati)*

The development of tourism in Sampulungan Village should ideally be closely tied to the support and active involvement of the village community. However, based on initial observations, specifically interviews with village office employees, it was stated that there has been no other form of participation from the community apart from serving at existing tourist attractions. Hence, it can be said that the level of community participation in tourism development in Sampulungan Village remains low. This research aims to analyze the village's potential, identify the level of community participation, and formulate strategies for enhancement. The study was conducted in Sampulungan Village, North Galesong District, Takalar Regency, from September 2021 to November 2022. Data collection methods included surveys, questionnaires, interviews, and documentation. Several techniques were employed, such as descriptive analysis, correlation analysis, Guttman scale, mapping, SWOT analysis, AHP. The research results indicate that community participation, according to Arnstein's ladder of participation theory, falls within the non-participation category. Therefore, strategies were developed to increase community participation based on influential factors. These strategies include leveraging cultural potential as a tourist attraction, establishing Tourism Awareness Groups, conducting training in creative tourism management, conducting road maintenance and repairs on damaged roads, as well as adding clear directional signs to tourist destinations. Among these strategies, the priority is to establish Tourism Awareness Groups for the local community.

Keywords: Arnstein, community participation, tourism development, SWOT.



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR RUMUS.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pertanyaan Penelitian.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	5
1.5.1 Ruang lingkup materi.....	5
1.5.2 Ruang lingkup wilayah.....	5
1.6 <i>Output</i> Penelitian.....	5
1.7 <i>Outcome</i> Penelitian.....	5
1.8 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pengembangan Pariwisata.....	7
2.2 Partisipasi Masyarakat.....	9
2.2.1 Konsep partisipasi masyarakat.....	9
2.2.2 Tingkat partisipasi masyarakat.....	11
2.2.3 Faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat.....	14
2.2.4 Indikator tingkat partisipasi masyarakat.....	15
2.3 Penelitian Terdahulu.....	17
2.4 Kerangka Pikir.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	20
3.1 Jenis Penelitian.....	20
3.2 Lokasi Penelitian.....	20
3.3 Jenis Data.....	22
3.4 Variabel Penelitian.....	23
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	24
3.6 Populasi dan Sampel.....	24
3.7 Teknik Analisis Data.....	25
3.8 Definisi Operasional.....	32
3.8.1 Kerangka Penelitian.....	33
3.8.2 HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
3.8.3 Pembahasan Umum.....	34
3.8.4.1 Kabupaten Takalar.....	34
3.8.4.2 Kecamatan Galesong Utara.....	36



4.1.3 Desa Sampulungan	38
4.2 Potensi Pariwisata Desa Sampulungan.....	42
4.2.1 Potensi masyarakat Desa Sampulungan	42
4.2.2 Potensi wisata Desa Sampulungan	56
4.3 Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Sampulungan.....	75
4.4 Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa Sampulungan.....	78
4.4.1 Identifikasi faktor internal dan eksternal	78
4.4.2 Analisis matriks IFAS-EFAS dan matriks SWOT	79
4.4.3 Penetapan strategi SWOT	84
4.4.4 Penetapan strategi prioritas dengan <i>Analytical Hierarchy Process</i>	91
BAB V PENUTUP.....	93
5.1 Kesimpulan.....	93
5.2 Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	100
<i>CURRICULUM VITAE</i>	104



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pikir	19
Gambar 3.1	Peta Lokasi Penelitian	21
Gambar 3.2	Diagram Analisis SWOT	28
Gambar 3.3	Kerangka Penelitian	33
Gambar 4.1	Peta Administrasi Kabupaten Takalar.....	35
Gambar 4.2	Peta Administrasi Kecamatan Galesong Utara	37
Gambar 4.3	Peta Administrasi Desa Sampulungan	39
Gambar 4.4	Grafik Rata-rata Tingkat Partisipasi Berdasarkan Tingkat Usia	44
Gambar 4.5	Grafik Distribusi Kelompok Masyarakat Berdasarkan Jenis Kelamin.....	45
Gambar 4.6	Grafik Rata-rata Tingkat Partisipasi Berdasarkan Jenis Kelamin.....	46
Gambar 4.7	Grafik Rata-rata Tingkat Partisipasi Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	48
Gambar 4.8	Grafik Distribusi Kelompok Masyarakat Berdasarkan Lama Tinggal	49
Gambar 4.9	Grafik Rata-rata Tingkat Partisipasi Berdasarkan Lama Tinggal	50
Gambar 4.10	Grafik Distribusi Kelompok Masyarakat Berdasarkan Pekerjaan.....	51
Gambar 4.11	Grafik Rata-rata Tingkat Partisipasi Berdasarkan Pekerjaan..	53
Gambar 4.12	Grafik Rata-rata Tingkat Partisipasi Berdasarkan Tingkat Penghasilan	55
Gambar 4.13	Peta <i>Mapping</i> Potensi Wisata Alam Desa Sampulungan.....	57
Gambar 4.14	Peta <i>Mapping</i> Potensi Wisata Budaya Desa Sampulungan ...	59
Gambar 4.15	Akomodasi Wisata Pantai Galesong	60
Gambar 4.16	Peta <i>Mapping</i> Potensi Wisata Buatan Desa Sampulungan	72
Gambar 4.17	Peta Aksesibilitas ke Desa Sampulungan	74
Gambar 4.18	Peta Aksesibilitas Antar Desa/Kelurahan Kecamatan Galesong Utara.....	76
Gambar 4.19	Grafik Rekapitulasi Data Tingkat Partisipasi Masyarakat.....	79
Gambar 4.20	Diagram Penetapan Strategi SWOT.....	86
Gambar 4.21	Peta Rekomendasi Lokasi Perbaikan Jalan	91
Gambar 4.22	Peta Rencana Titik Rambu Petunjuk Arah.....	92
Gambar 4.23	Hirarki Prioritas.....	94
Gambar 4.24	Skoring Strategi Prioritas	94



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator Tingkat Partisipasi Masyarakat	16
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu	17
Tabel 3.1	Jenis Data	22
Tabel 3.2	Variabel Penelitian	23
Tabel 3.3	Matriks SWOT	28
Tabel 3.4	Skala Banding Secara Berpasangan pada AHP.....	31
Tabel 4.1	Luas Daerah menurut Kecamatan di Kabupaten Takalar Tahun 2021	34
Tabel 4.2	Luas Daerah menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Galesong Utara Tahun 2022.....	36
Tabel 4.3	Distribusi Jumlah Penduduk menurut Kelompok Usia di Desa Sampulungan, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar .	40
Tabel 4.4	Distribusi Penduduk menurut Jenis Kelamin di Desa Sampulungan, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar .	40
Tabel 4.5	Distribusi Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan di Desa Sampulungan, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.....	41
Tabel 4.6	Distribusi Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Pekerjaan	42
Tabel 4.7	Distribusi Masyarakat Berdasarkan Kelompok Usia	42
Tabel 4.8	Analisis <i>Spearman</i> Hubungan Usia dan Tingkat Partisipasi Masyarakat	43
Tabel 4.9	Rata-rata Tingkat Partisipasi Berdasarkan Tingkat Usia	43
Tabel 4.10	Uji <i>Chi-Square</i> Hubungan Jenis Kelamin dan Tingkat Partisipasi Masyarakat.....	45
Tabel 4.11	Distribusi Masyarakat Berdasarkan Tingkat Pendidikan	46
Tabel 4.12	Analisis <i>Spearman</i> Hubungan Pendidikan dan Tingkat Partisipasi Masyarakat.....	47
Tabel 4.13	Rata-rata Tingkat Pendidikan Berdasarkan Tingkat Usia	47
Tabel 4.14	Uji <i>Chi-Square</i> Hubungan Lama Tinggal dan Tingkat Partisipasi Masyarakat.....	49
Tabel 4.15	Distribusi Masyarakat Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	51
Tabel 4.16	Uji <i>Chi-Square</i> Hubungan Pekerjaan dan Tingkat Partisipasi Masyarakat	52
Tabel 4.17	Distribusi Masyarakat Berdasarkan Penghasilan	53
Tabel 4.18	Analisis <i>Spearman</i> Hubungan Penghasilan dan Tingkat Partisipasi Masyarakat.....	54
Tabel 4.19	Rata-rata Tingkat Partisipasi Berdasarkan Tingkat Penghasilan .	54
Tabel 4.20	Fasilitas Wisata Pantai Galesong	61
Tabel 4.21	Fasilitas <i>The View</i>	66
Tabel 4.22	Fasilitas Rumah Makan <i>Balla Juku</i>	69
	3 Aksesibilitas berdasarkan Jarak dan Waktu Tempuh.....	73
	4 Aksesibilitas Antar Desa/Kelurahan di Kecamatan Galesong Utara	75
	5 Klasifikasi Indikator menurut Arnstein.....	77
	6 Hasil Kuesioner Tingkat Partisipasi Masyarakat	78



Tabel 4.27 Matriks IFAS Partisipasi Masyarakat pada Pengembangan Pariwisata Desa Sampulungan	82
Tabel 4.28 Matriks EFAS Partisipasi Masyarakat pada Pengembangan Pariwisata Desa Sampulungan	83
Tabel 4.29 Matriks SWOT Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat pada Pengembangan Pariwisata Desa Sampulungan	84



DAFTAR RUMUS

Rumus 1	Rumus Slovin	24
---------	--------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuesioner Penelitian.....	102
Lampiran 2	Dokumentasi Survei Lapangan.....	103



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wilayah pesisir merupakan wilayah peralihan antara ekosistem darat dan lautan, mengandung beragam sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang bernilai tinggi baik secara ekonomi dan ekologi. Wilayah pesisir Indonesia terbentang luas dari Sabang hingga Merauke. Indonesia merupakan negara dengan potensi sumber daya alam yang banyak, terkhusus pada bidang kemaritiman. Indonesia disebut juga sebagai negara maritim sekaligus sebagai negara dengan kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sebanyak 17.504. Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 95.181 km dan merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia, dengan luas perairan laut mencapai 5,8 juta km², yang merupakan 71% dari keseluruhan wilayah Indonesia (Pregiwati, 2019). Dengan segala kekayaan yang dimiliki, wilayah pesisir Indonesia memiliki berbagai fungsi yang bermanfaat untuk kehidupan manusia salah satunya karena karakteristik topografi wilayah pesisir yaitu di daratan sehingga mendukung adanya pembangunan ataupun aktivitas manusia lainnya, contohnya adalah kawasan pariwisata.

Menurut UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Objek pariwisata Indonesia menjadi salah satu sektor yang dapat dimanfaatkan untuk pemasukan negara. Sektor pariwisata memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Industri pariwisata menjadi salah satu faktor yang mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan memperluas kesempatan kerja maupun kesempatan berusaha, sumber penerimaan devisa, serta pembangunan infrastruktur (BPS, 2022a). BPS menjelaskan bahwa sektor pariwisata menempati urutan keempat dalam penerimaan devisa negara

jumlah mencapai 12,23 miliar US\$ dan pada tahun 2016 naik menjadi : kedua dengan jumlah mencapai 13.569 miliar US\$ (Anandhyta & 2020). Karena potensi ini sehingga terus diperlukan usaha dalam



pengembangan pariwisata di Indonesia sejalan dengan TAP MPR No. IV/MPR/1978 yang menjelaskan bahwa pariwisata perlu ditingkatkan dan diperluas untuk meningkatkan penerimaan devisa, memperluas lapangan kerja dan memperkenalkan kebudayaan.

Pengembangan sektor pariwisata terkhusus di wilayah pesisir dalam prosesnya tentu diperlukan banyak pihak yang terlibat untuk bekerja sama agar mencapai hasil yang maksimal. Tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam proses pengembangan pariwisata pesisir. Salah satu yang menjadi alasan pentingnya partisipasi masyarakat adalah masyarakat setempat lebih mengetahui kondisi dan karakteristik wilayahnya. Selain itu masyarakat akan lebih percaya terhadap program pembangunan jika dilibatkan langsung karena adanya rasa memiliki terhadap objek tersebut.

Salah satu sektor pariwisata di wilayah pesisir Indonesia yaitu di Kabupaten Takalar tepatnya Pantai Sampulungan yang terletak di Desa Sampulungan, Kecamatan Galesong Utara. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 – 2039 mengatur bahwa Pantai Sampulungan Galesong termasuk ke dalam zona pariwisata sub zona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil atau yang disebut KPU-W-P3K. Selain itu, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2020 – 2035 juga menyebutkan bahwa Pantai Sampulungan termasuk sebagai salah satu Kawasan Strategi Pariwisata Daerah (KSPD) yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata kabupaten.

Sampulungan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam berupa air yang melimpah sehingga dimanfaatkan untuk membangun objek pariwisata di pesisir pantai. Melihat perkembangan pariwisata di Desa Sampulungan seharusnya



tidak lepas dari adanya dukungan serta partisipasi masyarakat di Desa Sampulungan. Namun sebaliknya, berdasarkan observasi awal yang dilakukan yaitu wawancara dengan pegawai Kantor Desa Sampulungan, mengatakan bahwa belum ada bentuk partisipasi lain dari masyarakat selain menjadi pekerja di

objek pariwisata di Desa Sampulungan. Maka dapat dikatakan bahwa masyarakat Desa Sampulungan memiliki tingkat partisipasi yang rendah pada pembangunan dan pengembangan pariwisata di Desa Sampulungan.

Sementara partisipasi merupakan salah satu hal yang penting dalam sebuah proses pembangunan. Segala bentuk pembangunan harus melibatkan peran serta masyarakat, karena mereka yang dapat mengetahui permasalahan dan kebutuhan pembangunan di wilayahnya. Mereka juga yang nantinya akan memanfaatkan dan menilai keberhasilan program pembangunan di wilayahnya (Hakim, 2017). Alasan pentingnya partisipasi masyarakat juga dikemukakan oleh Moeltarjo (dalam Muslim, 2007) diantaranya:

- a. Masyarakat merupakan fokus dan tujuan utama dari pembangunan, karena itu partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut. Memandang masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan akan mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi.
- b. Partisipasi menciptakan suatu umpan balik informasi tentang sikap, keinginan, kebutuhan dan kondisi daerah.
- c. Partisipasi akan menumbuhkan rasa percaya masyarakat pada program pembangunan karena merasa dilibatkan dalam setiap prosesnya.
- d. Partisipasi dianggap sebagai hak masyarakat untuk memberikan pandangannya terhadap suatu program pembangunan.
- e. Partisipasi merupakan cara yang efektif untuk membangun kemampuan masyarakat dalam mengelola program pembangunan sesuai dengan ciri khas lokal.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya diketahui alasan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan. Namun pada observasi awal disebutkan bahwa partisipasi masyarakat pada pengembangan pariwisata di Desa Sampulungan tersebut rendah. Hal ini menunjukkan ketidakselarasan antara teori pentingnya partisipasi masyarakat dengan kondisi eksisting yang ada. Melihat permasalahan



yang menarik perhatian penulis untuk memilih daerah tersebut sebagai objek penelitian. Tantangan akan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan industri pariwisata yang menjadi perhatian penulis untuk mencari

tahu dan memahami faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata lokal. Maka dari itu dilakukan analisis untuk membuat strategi peningkatan partisipasi masyarakat pada pengembangan pariwisata di Desa Sampulungan.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat ditetapkan pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana potensi pariwisata yang dimiliki Desa Sampulungan?
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat pada pengembangan pariwisata di Desa Sampulungan?
3. Bagaimana strategi peningkatan partisipasi masyarakat pada pengembangan pariwisata di Desa Sampulungan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengidentifikasi potensi pariwisata yang dimiliki Desa Sampulungan.
2. Menganalisis tingkat partisipasi masyarakat pada pengembangan pariwisata di Desa Sampulungan.
3. Menyusun strategi peningkatan partisipasi masyarakat pada pengembangan pariwisata di Desa Sampulungan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari adanya penelitian ini, yaitu:

1. Bagi mahasiswa, diharapkan dapat menjadi referensi, sumber informasi, dan bahan masukan bagi mahasiswa yang ingin meneliti tentang kaitan antara tingkat partisipasi masyarakat.
2. Bagi pemerintah, diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pembuatan aturan-peraturan daerah yang terkait partisipasi masyarakat pada pengembangan pariwisata.



1.5 Ruang Lingkup Penelitian

1.5.1 Ruang lingkup materi

Ruang lingkup materi penelitian ini meliputi pengembangan pariwisata desa ditinjau dari potensi masyarakat dan potensi wisata, partisipasi masyarakat pada pengembangan pariwisata berdasarkan tingkatan partisipasinya menurut teori Arnstein, dan strategi peningkatan partisipasi masyarakat pada pengembangan pariwisata.

1.5.2 Ruang lingkup wilayah

Lokasi penelitian ini dibatasi untuk kawasan Desa Sampulungan, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.

1.6 Output Penelitian

Output yang dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang berisi 5 bab dengan judul “*Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat pada Pengembangan Pariwisata (Studi Kasus Desa Sampulungan, Kabupaten Takalar)*”.
2. Jurnal penelitian sebagai bahan publikasi dengan judul “*Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat pada Pengembangan Pariwisata (Studi Kasus Desa Sampulungan, Kabupaten Takalar)*”.
3. Poster informasi mengenai “*Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat pada Pengembangan Pariwisata (Studi Kasus Desa Sampulungan, Kabupaten Takalar)*”.
4. *Summary book*.

1.7 Outcome Penelitian

Sejalan dengan pelaksanaan penelitian ini, maka *outcome* yang diharapkan yaitu antara lain:



ngkatkan perhatian dan pengetahuan masyarakat, akademisi, dan rintah terkait tingkat partisipasi masyarakat pada pengembangan wisata.

2. Adanya bentuk konsep arahan strategi peningkatan partisipasi masyarakat pada pengembangan pariwisata.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab dengan rincian pembahasan untuk masing-masing bab adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, pada bab ini membahas mengenai latar belakang dilakukannya penelitian, merumuskan pertanyaan dan tujuan penelitian, manfaat dilakukannya penelitian, ruang lingkup penelitian, serta *output* dan *outcome* yang dihasilkan dari penelitian ini.
2. Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini membahas terkait teori-teori maupun kajian-kajian yang berkaitan dengan rumusan masalah yang akan dijawab.
3. Bab III Metode Penelitian, pada bab ini menjelaskan jenis, sumber dan teknik pengumpulan data, teknik analisis yang digunakan penulis dalam penelitian, waktu dan lokasi penelitian, definisi operasional, variabel penelitian, serta kerangka penelitian.
4. Bab IV Hasil dan Pembahasan, pada bab ini berisi hasil pembahasan dan analisis yang dilakukan penulis berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.
5. Bab V Penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil pembahasan dan analisis, serta saran yang dapat memberikan acuan kedepannya bagi beberapa pihak dalam mewujudkan tujuan dan manfaat dari penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengembangan Pariwisata

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menyatakan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Adapun pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah. A.J Burkat (dalam Damanik, dalam Suot dkk., 2021) mendefinisikan pariwisata sebagai perjalanan sementara dalam jangka pendek ke tempat tujuan selain dari tempat biasanya mereka tinggal, bekerja dan melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Adapun pengertian pariwisata menurut Yoeti (dalam Rizkiyani & Suprihardjo, 2013) adalah kegiatan perjalanan secara sementara yang diselenggarakan di tempat lain dengan tujuan bukan untuk kegiatan bisnis atau mencari nafkah pada tempat yang dikunjungi, namun semata-mata untuk menikmati pengalaman perjalanan tersebut, termasuk pertamasyaan dan rekreasi atau memenuhi berbagai keinginan. Berdasarkan beberapa pengertian sebelumnya, disimpulkan bahwa pariwisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan secara sementara dengan tujuan rekreasi atau menikmati objek dan daya tarik suatu tempat.

Siswokratono (dalam Nurhayati & Widiastuti, 2022) membagi tiga potensi wisata diantaranya potensi tersebut dapat berupa potensi alam, budaya, buatan dengan banyaknya kekhasan lokal, kearifan lokal, dan keaslian bentuknya.

1. Wisata alam

Suwarti dkk. (2022) menyatakan potensi wisata alam mengacu pada kondisi flora dan fauna suatu daerah, bentang alam seperti pantai, hutan, pegunungan
ain-lain (keadaan fisik suatu daerah).



2. Wisata budaya

Budaya merupakan salah satu sumber daya penting dalam pariwisata. Salah satu alasan seseorang bepergian adalah untuk melihat dan mempelajari gaya hidup dan budaya orang lain yang tinggal di tempat lain (Haryani dkk., 2022). Menurut Utama (dalam Haryani dkk., 2022) daya tarik wisata budaya berasal dari kekayaan suatu daerah antara lain yaitu ritual kelahiran, tarian tradisional, pakaian tradisional, cagar budaya, bangunan bersejarah, peninggalan tradisional, kain tradisional, tekstil lokal, pertunjukan tradisional, adat istiadat setempat, museum, dan lainnya.

3. Wisata buatan

Wisata buatan yang dimaksud adalah daya tarik wisata yang merupakan buatan manusia (Suwarti dkk., 2022).

Pengembangan menurut Yoeti (dalam Primadany dkk., 2013) adalah usaha atau cara untuk memajukan dan mengembangkan sesuatu yang sudah ada. Pengembangan pariwisata pada suatu destinasi selalu akan diperhitungkan dengan mempertimbangkan keuntungan dan manfaat bagi penduduk sekitar. Terkait dengan pembangunan pariwisata, Paturusi (dalam Nainggolan & Kampana, 2015) menyatakan bahwa pengembangan merupakan suatu strategi yang bertujuan untuk memperbaiki, dan meningkatkan kondisi kepariwisataan suatu objek dan daya tarik wisata. Di samping itu, dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi wisatawan, industri pariwisata (*investor*), pemerintah, dan masyarakat yang ada di sekitar objek wisata. Hal serupa juga dikatakan oleh Mill (2010) bahwa pengembangan pariwisata yang baik akan memberikan manfaat bagi wisatawan maupun masyarakat setempat, dapat membantu meningkatkan perekonomian mereka serta akan memberikan pengalaman bagi para wisatawan. Pengembangan pariwisata pada dasarnya dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan permasalahan.



Dalam pengembangan pariwisata, sikap hidup dan kualitas lingkungan harus tetap an dan dijaga. Pengembangan pariwisata dilakukan sesuai dengan pengembangan oleh berbagai industri wisata, baik pada skala menengah r, maupun dalam skala kecil tetap mendapatkan manfaat (BPS, 2022a).

Samaraweera dan Upekshani (2019) menyatakan terdapat lima faktor yang memengaruhi keberhasilan pengembangan pariwisata yang dikenal sebagai komponen 5A, diantaranya yaitu:

1. Akomodasi, dalam pariwisata akomodasi dianggap sebagai rumah kedua bagi wisatawan. Akomodasi berarti tempat dimana wisatawan dapat bermalam atau beristirahat. Agar kegiatan pariwisata berjalan dengan kondusif dan dapat menjamin kenyamanan wisatawan perlu didukung dengan fasilitas penginapan yang memadai (BPS, 2018).
2. Amenitas, yaitu semua fasilitas yang dapat memberikan pelayanan kepada pengunjung. Ketersediaan fasilitas juga akan memengaruhi wisatawan untuk berkunjung dan menikmati objek wisata relatif lebih lama (Saway dkk., 2021).
3. Atraksi, adalah keunikan suatu tempat yang lebih banyak menarik pengunjung. Atraksi disebut juga sebagai alasan utama wisatawan berkunjung karena adanya daya tarik tempat wisata (Fikiya dkk., 2021).
4. Aksesibilitas, yaitu sarana yang menjadi faktor untuk mencapai tujuan wisata. Rossadi dan Widayati (2018) menyebutkan aksesibilitas sebagai alat yang memudahkan seseorang untuk melakukan perjalanan wisata.
5. Aktivitas, berarti segala kegiatan yang dapat dilakukan di objek wisata. Komponen ini yang akan memberikan pengalaman bagi wisatawan selama berada di destinasi wisata (Chaerunnisa & Yuniningsih, 2020).

2.2 Partisipasi Masyarakat

2.2.1 Konsep partisipasi Masyarakat

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*participation*" yang berarti mengambil keputusan. Sumaryadi (dalam Masruri, 2020) menyatakan bahwa partisipasi merujuk pada keterlibatan individu atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, baik dengan menyatakan pendapat maupun menyalurkan pikiran, waktu, keterampilan, modal, atau sumber daya lainnya. Selain itu partisipasi mencakup pemanfaatan hasil pembangunan dan kepuasan atas hasil yang Singkatnya, partisipasi adalah peran serta seseorang atau sekelompok orang secara fisik maupun non-fisik dalam suatu kegiatan, serta memanfaatkan



dan menikmati hasilnya.

Arimbi (dalam Laily, 2015) mendefinisikan partisipasi sebagai *feed-forward information and feedback information*. Dengan pengertian tersebut, partisipasi masyarakat diartikan sebagai proses komunikasi dua arah yang berkelanjutan. Hal ini diartikan bahwa partisipasi masyarakat adalah komunikasi antara pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan masyarakat sebagai pihak yang secara langsung merasakan dampak dari kebijakan tersebut.

Partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam melakukan pembangunan. Adapun peran-peran tersebut dikemukakan oleh Djoeffan (2002) diantaranya:

- a. Forum partisipasi masyarakat akan berpotensi mendorong para perencana untuk membuat berbagai kebijakan dan rencana pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Pembuatan keputusan akan lebih akurat, sah secara hukum, dan sesuai dengan kenyataan.
- b. Partisipasi masyarakat dapat berperan sebagai faktor transformatif dalam pembangunan politik dan pembangunan ekonomi dengan mengutamakan kepentingan kelompok masyarakat di suatu negara. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat berpotensi memengaruhi rencana pembangunan untuk memicu perubahan sosial dan sebaliknya.
- c. Partisipasi dapat meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat melalui perilaku yang positif, seperti perubahan etos kerja dan perbaikan moral yang sesuai dengan hukum, norma, dan agama.
- d. Partisipasi dapat menjadi bagian penting dari rencana pembangunan yang komprehensif. Semakin beragam minat yang disajikan, maka semakin banyak inovasi yang bisa diusulkan. Semakin cepat desentralisasi, semakin banyak inovasi yang dapat diperkenalkan dan semakin komprehensif perencanaan pembangunan yang dibuat.
- e. Partisipasi dapat berperan dalam menciptakan badan pembuat keputusan yang
- if. Perencanaan lokal akan lebih sesuai dengan apa yang diinginkan rakyat apabila didiskusikan secara luas dalam kelompok partisipasi.



- f. Partisipasi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang fungsi perencanaan pembangunan sebagai suatu kekuatan demokrasi dan kekuatan masyarakat.
- g. Partisipasi masyarakat dapat berperan dalam kritik terhadap model pembangunan yang sudah mapan.

2.2.2 Tingkat partisipasi masyarakat

Arnstein (1969) mengemukakan tingkatan partisipasi masyarakat yang diklasifikasikan berdasarkan pengaruh atau keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Ada delapan tingkatan partisipasi masyarakat dari terendah hingga tertinggi, yaitu:

1. Manipulasi (*manipulation*)

Pada tangga partisipasi, manipulasi merupakan tangga yang terendah. Dalam tingkat ini masyarakat tidak memiliki partisipasi apapun terhadap pembangunan. Dalam tingkat ini masyarakat menerima hasil dari pengambilan keputusan dan tidak melakukan partisipasi apapun.

2. Terapi (*therapy*)

Pada tingkatan ini tidak berbeda jauh dengan tingkatan sebelumnya, dimana masyarakat belum dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Peran masyarakat hanya menyetujui dan menerima keputusan yang ada tanpa partisipasi aktif. Tahap ini masyarakat tidak memiliki pengaruh pada program yang dijalankan.

3. Informasi (*informing*)

Partisipasi pada tingkat ini adalah pemberian informasi satu arah dari pemerintah kepada masyarakat. Dalam tingkat ini masyarakat tidak difasilitasi untuk memberikan umpan balik atau partisipasi aktif. Bentuk komunikasi ini menyulitkan masyarakat untuk berpengaruh pada keputusan yang dibuat.

4. Konsultasi (*consultation*)



Itasi yang efektif harus mencakup partisipasi penuh oleh masyarakat. Hal erarti dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat diberikan patan untuk berpendapat menyatakan keinginan dan kebutuhan mereka.

Sehingga, hasil partisipasi menjadi lebih bermakna dan mampu berpengaruh pada pengambilan keputusan yang lebih relevan dan berdampak positif bagi masyarakat.

5. Penentruman (*placation*)

Pada titik ini, masyarakat mulai sedikit berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Namun, bentuk partisipasi sering kali masih bersifat tokenisme dan pemegang kekuasaan yang tetap mengendalikan keputusan akhir. Singkatnya, meskipun telah ada upaya untuk melibatkan masyarakat, tetapi masih terbatas sehingga masyarakat belum memberikan pengaruh yang signifikan dalam pengambilan keputusan.

6. Kemitraan (*partnership*)

Pada tingkat ini pembagian kekuasaan lebih merata dan masyarakat memiliki pengaruh nyata dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Dalam kemitraan, masyarakat memiliki hak untuk meninjau rencana yang diajukan oleh pemegang kekuasaan, memberikan rekomendasi, bahkan menolak terhadap suatu rencana sebelum dilaksanakan. Kemitraan yang efektif akan memperkuat pengaruh masyarakat dan memberi mereka kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Dengan cara ini, masyarakat akan merasa seperti mitra yang diberdayakan dalam hal perubahan positif di lingkungannya.

7. Pelimpahan kekuasaan (*delegated power*)

Dalam konteks partisipasi masyarakat, pelimpahan kekuasaan berarti memberikan wewenang pengambilan keputusan yang lebih dominan kepada masyarakat atas rencana atau program tertentu. Dalam pelimpahan kekuasaan, masyarakat memiliki peranan yang lebih kuat dan tanggung jawab yang lebih besar dalam mengatur dan melaksanakan program atau kebijakan yang berdampak pada lingkungannya. Mereka berhak memutuskan dan memengaruhi sebuah keputusan maupun rencana. Pelimpahan kekuasaan merupakan bentuk



gkatan kemitraan dan partisipasi antara masyarakat dan pemegang kekuasaan. Hal ini memungkinkan masyarakat memiliki pengaruh yang lebih atas rencana dan kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka, dan

memberikan kesempatan untuk menciptakan perubahan positif dalam lingkungannya.

8. Kontrol masyarakat (*citizen control*)

Kontrol masyarakat adalah upaya memberikan kekuasaan, tanggung jawab, dan otonomi yang lebih besar kepada masyarakat dalam mengelola program atau lembaga yang memengaruhi kehidupan mereka. Konsep ini berfokus untuk memberdayakan masyarakat dalam bertanggung jawab atas pengambilan keputusan yang berdampak di lingkungan mereka. Tujuan dari konsep ini yaitu untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan, serta bertanggung jawab atas kebijakan yang dibuat. Dengan adanya ini, masyarakat diharapkan memiliki kemampuan berusaha untuk kepentingan mereka, berkolaborasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program, serta berbicara secara efektif atas nama mereka sendiri.

Kedelapan tingkatan tersebut dikategorikan menjadi tiga yaitu:

1. Tidak partisipatif (*non participation*)

Anak tangga terbawah diantaranya (1) manipulasi dan (2) terapi, menggambarkan tingkat “non-partisipasi” atau tidak berpartisipasi dalam apapun. Masyarakat hanya menerima keputusan yang telah dirancang tanpa aktif berpartisipasi. Dalam tahap ini masyarakat tidak memiliki pengaruh dan tidak berhak dalam pengambilan keputusan yang dibuat.

2. Derajat semu (*tokenism*)

Anak tangga (3) informasi dan (4) konsultasi berkembang ke tingkat “tokenisme”. Dalam kondisi ini masyarakat mendengar dan didengarkan, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk memastikan pendapat mereka diperhatikan oleh pemegang kekuasaan. Jika partisipasi terbatas pada level ini, tidak ada tindak lanjut, maka tidak ada jaminan perubahan status quo.

Selanjutnya anak tangga (5) penentraman, hanyalah tingkat tokenisme yang tinggi karena aturan dasar mengizinkan masyarakat untuk berdiskusi, yang berhak dalam pengambilan keputusan akhir adalah pemegang saan.



3. Kekuatan masyarakat (*citizen power*)

Tangga yang lebih tinggi yaitu tingkat kekuatan masyarakat di mana pengaruh pada pengambilan keputusan meningkat. Masyarakat dapat masuk ke dalam (6) kemitraan yang memungkinkan mereka untuk bernegosiasi dan bertukar dengan pemegang kekuasaan. Di anak tangga paling atas, (7) pelimpasan kekuasaan dan (8) kontrol masyarakat, dimana rakyat memperoleh kekuasaan dalam pengambilan keputusan secara penuh.

2.2.3 Faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat

Angell (dalam Ross dalam Irawan, 2019) bahwa partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang memengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

1. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang memengaruhi sikap masyarakat pada aktivitas sosial yang ada. Masyarakat yang termasuk dalam kelompok usia menengah ke atas, yang terikat secara moral terhadap nilai dan norma masyarakat, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Sunarti dan Slamet (dalam Purwandari & Mussadun, 2015) juga mengatakan bahwa usia akan memengaruhi cara dan pola berpikir seseorang.

2. Jenis kelamin

Partisipasi yang diberikan pria berbeda dengan wanita. Hal ini karena adanya sistem sosial yang memberikan kesempatan lebih kepada pria untuk lebih banyak berpartisipasi daripada wanita (Usia & Pribadi, 2014). Nilai yang telah lama tertanam dalam budaya berbagai bangsa yaitu tempat perempuan pada dasarnya adalah “dapur” yang artinya peranan utama perempuan dalam bermasyarakat yaitu mengurus rumah tangga. Namun, peran tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan pendidikan dan pembebasan perempuan yang semakin maju.



likan

likan diyakini dapat memengaruhi sikap seseorang terhadap ngannya, yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh

masyarakat. Faktor pendidikan dinilai penting karena akan memudahkan komunikasi dan interaksi dengan pihak luar serta tanggap terhadap inovasi yang ada (Slamet dalam Nurbaiti & Bambang, 2014).

4. Pekerjaan dan penghasilan

Kedua hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sebab pekerjaan seseorang menentukan seberapa besar penghasilan yang akan ia dapatkan. Pekerjaan dan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari akan membantu seseorang berpartisipasi pada suatu kegiatan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa perekonomian yang baik akan mendukung seseorang lebih berpartisipasi pada suatu kegiatan. Hapsari dkk. (2012) menyatakan bahwa masyarakat yang tingkat perekonomiannya lebih tinggi kebanyakan menggunakan uang dan jarang melakukan kerja fisik. Sementara masyarakat dengan ekonomi yang kurang, biasanya tidak mengkontribusikan uang dan berpartisipasi dalam hal tenaga.

5. Lama tinggal

Lamanya waktu seseorang tinggal dalam suatu tempat akan memengaruhi interaksi mereka dengan tempat tersebut. Semakin lama seseorang tinggal di lingkungan tertentu, maka semakin besar rasa memiliki terhadap lingkungan itu. Hal tersebut dapat dilihat dari tingginya partisipasi yang dilakukan dalam suatu kegiatan (Daulay dkk, 2022).

2.2.4 Indikator tingkat partisipasi masyarakat

Pengukuran tingkat partisipasi didasarkan pada teori Arnstein (1969) dengan kedelapan anak tangga partisipasi yaitu manipulasi, terapi, informasi, konsultasi, penentruman, kemitraan, pelimpahan kekuasaan, dan kontrol masyarakat. Penentuan indikator yang berhubungan dengan penelitian yaitu untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat digambarkan pada Tabel 2.1.



Tabel 2.1 Indikator Tingkat Partisipasi Masyarakat

Kategori	Tangga Arnstein	Indikator
Tidak partisipatif (<i>Non participation</i>)	Manipulasi (<i>manipulation</i>)	1. Partisipan mengetahui adanya pembangunan dan pengembangan objek wisata.
	Terapi (<i>therapy</i>)	2. Partisipan tidak keberatan dengan adanya pembangunan dan pengembangan objek wisata.
Derajat semu (<i>Tokenism</i>)	Informasi (<i>information</i>)	3. Pihak pengelola mengadakan rapat pengambilan keputusan terkait pembangunan dan pengembangan objek wisata.
		4. Partisipan hadir dalam rapat pengambilan keputusan terkait pembangunan dan pengembangan objek wisata.
	Konsultasi (<i>consultation</i>)	5. Pihak pengelola memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpendapat atau memberi masukan terkait pembangunan dan pengembangan objek wisata.
		6. Partisipan memberikan pendapat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan dan pengembangan objek wisata.
Kekuatan masyarakat (<i>Citizen power</i>)	Penentraman (<i>placation</i>)	7. Partisipan mendapat tanggapan terkait pendapat yang diberikan.
	Kemitraan (<i>partnership</i>)	8. Partisipan memberi pengaruh dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan dan pengembangan objek wisata.
		9. Partisipan aktif membantu dalam proses pembangunan dan pengembangan objek wisata.
	Pelimpahan kekuasaan (<i>delegated power</i>)	10. Partisipan memiliki wewenang dalam proses pembangunan dan pengembangan objek wisata.
	Kontrol masyarakat (<i>citizen control</i>)	11. Partisipan memiliki kendali penuh dalam proses pembangunan dan pengembangan objek wisata.

Sumber: Azhari, 2011; diolah oleh penulis, 2022.



2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

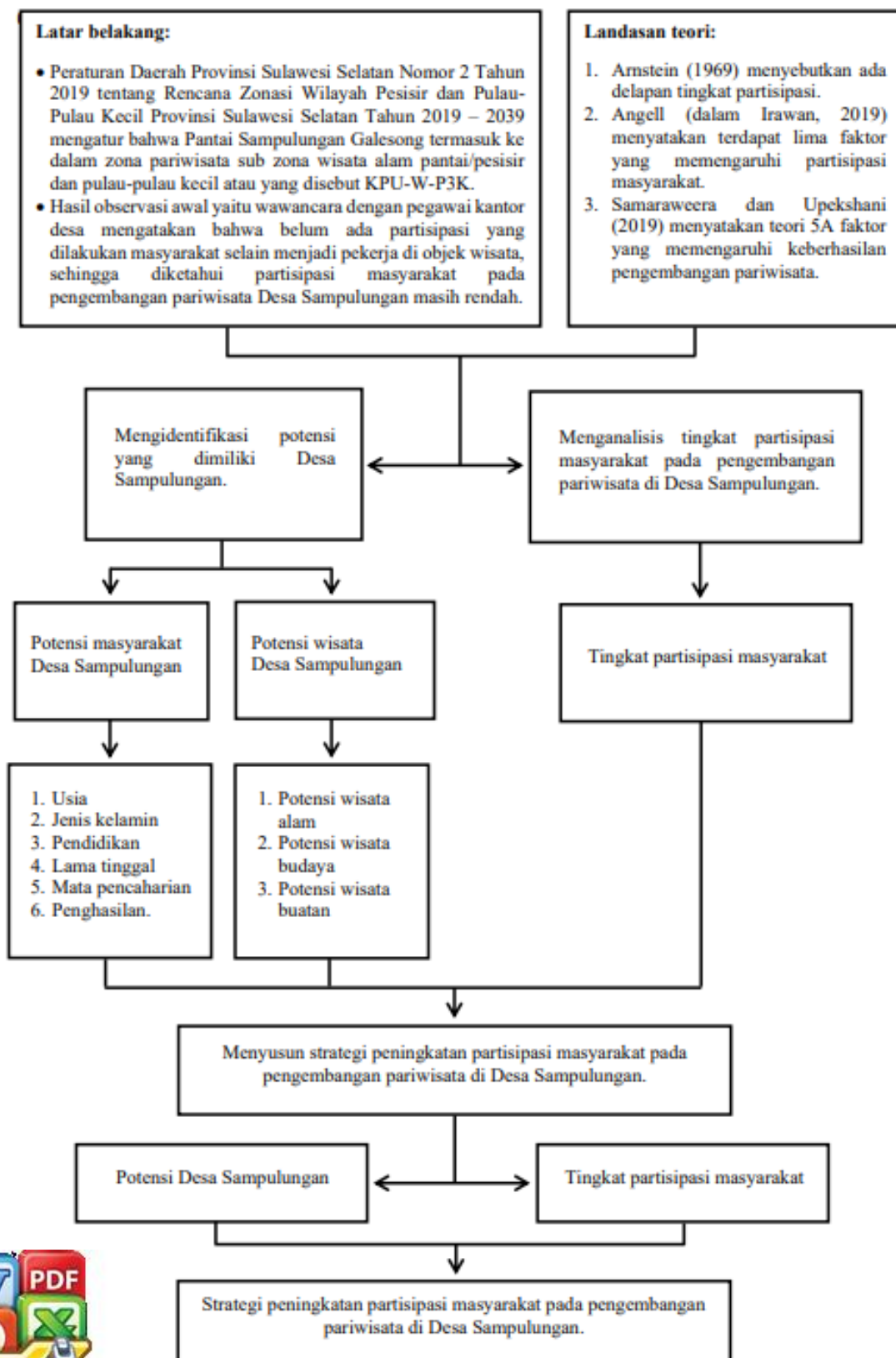
Judul	Penulis	Indikator	Metode Analisis	Hasil
Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Kegiatan Pariwisata Bejiharjo, Gunungkidul, Yogyakarta	Farizi Ramadhan dan Parfi Khadiyanto	Mengidentifikasi dan menganalisis pola pengelolaan pariwisata oleh masyarakat dan bagaimana bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan pariwisata di Kawasan Desa Wisata Bejiharjo.	Kuantitatif deskriptif	Kegiatan pengembangan pariwisata di Desa Bejiharjo sudah melibatkan masyarakat sejak awal inisiasi pengembangan pariwisata adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat membuat kegiatan pengembangan pariwisata dapat berjalan maksimal, sedangkan untuk tingkat partisipasi masyarakat di Desa Bejiharjo disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Desa Bejiharjo adalah tingkat kemitraan, dimana posisi masyarakat dan pemerintah dalam kewenangan adalah setara, dan bentuk partisipasi masyarakat di Desa Bejiharjo sebagian besar berbentuk partisipasi dalam tahap implementasi dengan menjadi <i>tourguide</i> , pengelola pariwisata dan anggota Pokdarwis.
Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Tahap Perencanaan dalam Program Neighbourhood Development	Kurnia Ibnu Azhari	Untuk mengetahui bagaimana proses partisipasi di Desa Jendi berlangsung serta tingkat partisipasi masyarakat Desa Jendi dalam tahap perencanaan.	Analisis kualitatif deskriptif, analisis kuantitatif deskriptif	Partisipasi masyarakat di Desa Jendi termasuk dalam kategori <i>tokenism</i> menurut Arnstein. Penghargaan masyarakat Desa Jendi cukup dihargai melalui pemberian informasi, diajak konsultasi, dan ditempatkan wakilnya dalam lembaga-lembaga pengambil keputusan, namun peran pemerintah masih sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan perencanaan.
Masyarakat dalam Wisata Pantai andang ζetapang	Elsa Yulianti Utami, Nana Novita Pratiwi, Riska A. Ayuningtyas	Mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pengembangan wisata Pantai Tanjung Belandang.	Deskriptif dan deskriptif korelasi	Menunjukkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pengembangan wisata Pantai Tanjung Belandang sangat beragam terdiri dari pikiran, tenaga, keahlian, barang dan uang. Tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pengembangan wisata Pantai Tanjung Belandang berada di tingkat tokenisme.



<p>Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam PNPM Unit Pariwisata di Kota Surakarta (Studi Kasus Kelurahan Sondakan, Laweyan dan Mojosongo)</p>	<p>Ratna Devi Septiandari, Kuswanto Nurhadi, Isti Andini</p>	<p>Mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam PNPM Unit Pariwisata di Kota Surakarta.</p>	<p>Deskriptif kuantitatif</p>	<p>Menunjukkan bahwa partisipasi dilakukan pada semua tahap Unit Pariwisata PNPM, sumbangan pikiran dan materi diberikan pada perencanaan dan pelaksanaan, serta partisipasi dalam bentuk uang diberikan pada tahap pelaksanaan dan pemanfaatan. Tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi. Faktor internal yang memengaruhi bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat adalah faktor jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan faktor pengetahuan publik. Sedangkan faktor eksternal yang memengaruhi bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat adalah pemerintah kota, pemerintah desa, LKM, dan fasilitator.</p>
--	--	---	-------------------------------	---



2.4 Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

